

**Tesis**

**ANALISIS KEUNGGULAN  
SUB SEKTOR EKONOMI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM  
SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN  
WILAYAH DI KABUPATEN TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

***ANALYSIS OF THE ADVANTAGES  
OF NATURAL RESOURCE BASED ECONOMIC SUB  
SECTORS AS THE BASIS FOR REGIONAL DEVELOPMENT  
POLICIES IN TANAH DATAR REGENCY,  
WEST SUMATRA PROVINCE***

**Disusun dan diajukan oleh  
MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT  
P022201039**



**PROGRAM STUDI  
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**ANALISIS KEUNGGULAN  
SUB SEKTOR EKONOMI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM  
SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN  
WILAYAH DI KABUPATEN TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT  
P022201039**

kepada

**SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**  
**ANALISIS KEUNGGULAN SUB SEKTOR**  
**EKONOMI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM**  
**SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH**  
**DI KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Disusun dan diajukan oleh**

**MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT**

**P022201039**

Telah di pertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 1 Desember 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi Syarat kelulusan

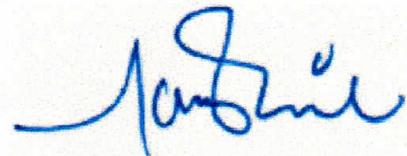
Menyetujui,

Pembimbing Utama



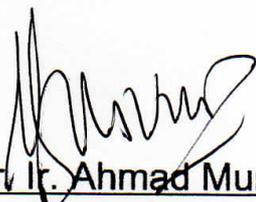
Prof. Dr. H. Hamka Naping, M.A.  
Nip.19611104 198702 1 001

Pembimbing Pendamping



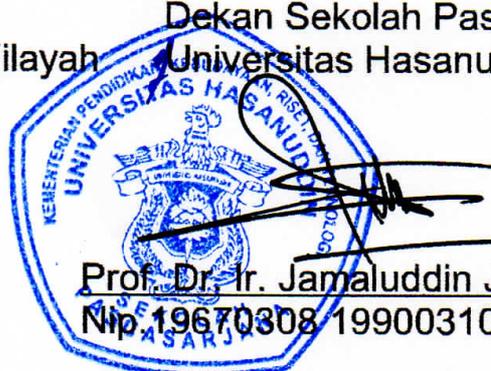
Dr. Ir. Mahyuddin, M.Si.  
Nip.19680702 199303 1 003

Ketua Program Studi.  
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah



Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng  
Nip.196207271989031003

Dekan Sekolah Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc  
Nip.19670308 1990031001

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syarif Hidayat  
NIM : P022201039  
Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 1 Desember 2021

Yang menyatakan



Muhammad Syarif Hidayat

## PRAKATA

Puji syukur, penulis haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas selesainya tesis ini. Gagasan yang melatarbelakangi tesis ini muncul dari pengamatan penulis terkait kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Datar. Penulis bermaksud menyumbangkan beberapa rekomendasi yang berguna sebagai pedoman perumusan kebijakan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar dalam mengatasi masalah perekonomian dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Keunggulan Sub Sektor Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam Sebagai Dasar Kebijakan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat yang merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi Magister pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.

Banyak hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan tesis ini berkat bantuan dari berbagai pihak, maka tesis ini dapat selesai pada waktunya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Prof. Dr. H. Hamka Naping, M.A.** selaku ketua komisi penasehat dan **Dr. Ir. Mahyuddin, M.Si.** selaku anggota komisi penasehat yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama pelaksanaan penelitian dan penyusunan tesis. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen penguji yakni **Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, M.S., Dr. Muh. Hatta Jamil, S.P., M.Si.,** serta **Dr. A. Nixia Tenriawaru, S.P., M.Si** yang telah memberikan saran dan masukan demi perbaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak **Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng.** selaku Ketua Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Semua pihak yang membantu dalam

penyelesaian penelitian tesis ini, kepada Pusbindiklatren Bappenas selaku penyedia beasiswa yang telah membiayai studi penulis, teman-teman PPW/Manajemen Perencanaan Angkatan 2020 yang telah bersama-sama berjuang serta terima kasih disampaikan kepada segenap pengelola Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, yang senantiasa memberikan dorongan dan kelancaran untuk menyelesaikan tesis ini. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Pada kesempatan ini juga, dengan penuh rasa syukur diucapkan penuh rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Abdul Malik, Ibunda Zulfah Hanum, Isteriku tercinta Khairun Nadiyah, Anakku Maryam Syarif Lubis serta Saudara-Saudaraku yang tiada henti memberikan doa dan dukungan agar dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Makassar, Desember 2021

Muhammad Syarif Hidayat

## ABSTRAK

**MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT.** *Analisis Keunggulan Sub Sektor Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam Sebagai Dasar Kebijakan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.* (dibimbing oleh **Hamka Naping** dan **Mahyuddin**)

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sub sektor unggulan berbasis sumber daya alam berdasarkan kriteria daya saing, sektor basis, laju pertumbuhan, dan kontribusi sektor dan selanjutnya dilakukan arahan pengembangan sub sektor unggulan tersebut secara substansial dan spasial di tiap Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar sehingga nantinya dijadikan pedoman perumusan kebijakan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data analisis shift share, analisis location quotient, laju pertumbuhan, dan kontribusi sektoral untuk selanjutnya bobot yang diperoleh dibandingkan dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) menggunakan Expert Choice 11. Arahan pengembangan secara substansial dengan melakukan evaluasi menggunakan indikator sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur, kelembagaan, dan produktivitas dan arahan secara spasial dilakukan berdasarkan hasil evaluasi substansial dengan menggunakan Arcgis 10.3.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman pangan dan tanaman hortikultura menjadi sub sektor unggulan dengan bobot secara berturut (20,9%) dan (14,7%). Untuk pengembangan sub sektor tanaman pangan di Kabupaten Tanah Datar, maka terdapat 9 Kecamatan sebagai prioritas pertama sebagai lokasi pengembangan sub sektor tanaman pangan. Sedangkan untuk sub sektor tanaman hortikultura terdapat 4 Kecamatan sebagai prioritas. Kecamatan Prioritas tersebut selain ditunjang oleh ketersediaan lahan yang cukup tinggi juga ditunjang oleh produktivitas kinerja yang tinggi, dan faktor penunjang lainnya. Arahan substansial diperoleh dari hasil evaluasi berdasarkan indikator sehingga apa yang menjadi kelemahan dari kecamatan prioritas tersebut hendaknya itu menjadi perhatian. Pengembangan secara spasial dapat dilakukan dengan melakukan pemetaan berupa sebaran komoditi unggulan dalam merumuskan kebijakan pembangunan, dan berfokus pada wilayah atau kecamatan yang menjadi prioritas berdasarkan hasil evaluasi substansial.

**Kata Kunci :** Sub sektor unggulan berbasis sumber daya alam, analisis shift share, location quotient, laju pertumbuhan, kontribusi sektoral, Analytical Hierarchy Process, arahan pengembangan substansial dan spasial

## ABSTRACT

**Muhammad Syarif Hidayat.** Analysis of the Advantages of Natural Resource-Based Economic Sub-Sectors as the Basis for Regional Development Policies in Tanah Datar Regency, West Sumatra Province. (guided by **Hamka Naping** and **Mahyuddin**).

This study aims to determine the leading sub-sector based on natural resources based on the criteria of competitiveness, base sector, growth rate, and sector contribution and then carry out directions for the development of the leading sub-sector substantially and spatially in each district in Tanah Datar Regency so that it will later be used as a guideline policy formulation.

This study uses quantitative research methods using data analysis techniques, shift share analysis methods, location quotient analysis, growth rates, and sectoral contributions. Then the weights obtained are compared with the Analytical Hierarchy Process (AHP) method using Expert Choice 11. Conduct evaluations using indicators of natural resources, human resources, technology, infrastructure, institutions, and productivity and spatial direction is carried out based on the results of substantial evaluations using Arcgis 10.3.

The results showed that food crops and horticultural crops were the leading sub-sectors with weights (20.9%) and (14.7%) respectively. For the development of the food crop sub-sector in Tanah Datar Regency, there are 9 districts as the first priority as the location for the development of the food crop sub-sector. The districts are X Koto, Pariangan, Rambatan, Lima Kaum, Tanjung Emas, Sungayang, Sungai Tarab, Salimpaung, and Tanjung Baru. Meanwhile, for the horticultural crop development sub-sector in Tanah Datar Regency, there are 4 districts as priority areas for the development of the horticultural crop sub-sector. The districts are X Koto, Sungai Tarab, Salimpung, and Tanjung Baru. The Priority Districts are not only supported by the availability of relatively high land, but also by high productivity, performance, and other supporting factors. Substantial guidance obtained from the evaluation results based on indicators so that what are the weaknesses of the priority districts are taken into account. Spatial development can be done by mapping in the form of superior commodities in formulating development policies, and focusing on priority areas or sub-districts based on substantial evaluations.

**Keywords:** natural resource-based leading sub-sector, shift share analysis, location quotient, growth rate, sectoral contribution, Analytical Hierarchy Process, substantial and spatial development directions

## DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	16
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. Pembangunan Ekonomi Daerah .....	18
B. Pengertian Sektor Unggulan .....	19
C. Sumber Daya Alam .....	20
D. Teori Pengembangan Wilayah .....	21
E. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	23
F. Produk Domestik Regional Bruto .....	25
G. Teori Basis Ekonomi .....	25
H. Pengembangan sektor unggulan sebagai upaya pembangunan ekonomi daerah .....	28
I. Pemetaan Sektor Unggulan .....	28
J. Sistem Informasi Geografis .....	29
K. Penelitian Terdahulu .....	30
L. Kerangka Konsep Penelitian .....	34

BAB III .....	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	36
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	36
C. Jenis dan Sumber Data.....	37
D. Teknik Analisis Data/ Metode Analisis .....	37
BAB IV .....	48
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	48
A. Gambaran Umum Wiayah.....	48
1. Kabupaten Tanah Datar .....	48
B. Analisis Sektor Unggulan Berbasis Sumber Daya Alam .....	50
1. Sektor Basis .....	50
2. Daya Saing.....	54
3. Kontribusi Sektoral .....	62
4. Laju Pertumbuhan .....	64
5. Analytical Hierarchy Process (AHP) .....	627
6. Arahana Pengembangan.....	85
BAB V.....	101
KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>
LAMPIRAN 1 .....	108
LAMPIRAN 2 .....	109

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha (Persen).....	5
Tabel 2.	PDRB Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2013-2019 .....	7
Tabel 3.	Alokasi Belanja Langsung Per Urusan di Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2015-2019.....	11
Tabel 4.	Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 5.	Penetapan Prioritas Elemen Dengan Perbandingan Berpasangan.....	43
Tabel 6.	Variabel dan Bobot Aspek Pengembangan Sub Sektor Unggulan Berbasis Sumber Daya Alam .....	47
Tabel 7.	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar .....	49
Tabel 8.	Data sub sektor PDRB berbasis sumber daya alam Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Tanah Datar Selama Tahun 2015-2019.....	51
Tabel 9.	Data sub sektor PDRB berbasis sumber daya alam ADHK Sumatera Barat Tahun 2015-2019 .....	52
Tabel 10.	Hasil Analisis LQ Sub Sektor Perekonomian Berbasis Sumber Daya Alam di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2019 .....	53
Tabel 11.	Data Sub Sektor Berbasis SDA PDRB Kabupaten Tanah Datar dan Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2015-2019 .....	56
Tabel 12.	Hasil Perhitungan Analisis Shift Share Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2019.....	57
Tabel 13.	Pengelompokan Hasil Perubahan dan Pergeseran Sub Sektor Berbasis SDA di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2019 ..	58
Tabel 14.	Kontribusi Sub Sektor Perekonomian Berbasis Sumber Daya Alam di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2019 .....	63

Tabel 15. Laju pertumbuhan masing-masing sub sektor perekonomian berbasis sumber daya alam di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2019.....	65
Tabel 16. Perbandingan Berpasangan Kriteria Daya Saing .....	70
Tabel 17. Perbandingan Berpasangan Kriteria Kontribusi Sektoral.....	73
Tabel 18. Perbandingan Berpasangan Kriteria Laju Pertumbuhan.....	76
Tabel 19. Perbandingan Berpasangan Kriteria Sektor Basis.....	79
Tabel 20. Skor potensi pengembangan tanaman pangan per kecamatan di Kabupaten Tanah Datar .....	87
Tabel 21. Skor potensi pengembangan tanaman hortikultura per kecamatan di Kabupaten Tanah Datar .....	92
Tabel 22. Sub Sektor unggulan dan sebaran komoditi unggulan di Kabupaten Tanah Datar .....	96

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2019 (miliar rupiah) .....	9
Gambar 2.	Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 3.	Analisis Shift Share .....	39
Gambar 4.	Aspek Pengembangan Sub Sektor Unggulan Berbasis Sumber Daya Alam.....	45
Gambar 5.	Pengelompokkan Kuadran per sub sektor .....	61
Gambar 6.	Struktur Hierarki AHP.....	67
Gambar 7.	Pembobotan Kriteria .....	69
Gambar 8.	Matriks Pairwise Comparison Kriteria Daya Saing .....	71
Gambar 9.	Pairwise Comparison Daya Saing.....	71
Gambar 10.	Matriks Pairwise Comparison Kriteria Kontribusi Sektoral...74	74
Gambar 11.	Pairwise Comparison Kontribusi Sektoral .....	75
Gambar 12.	Matriks Pairwise Comparison Kriteria Laju Pertumbuhan....77	77
Gambar 13.	Pairwise Comparison Laju Pertumbuhan .....	77
Gambar 14.	Matriks Pairwise Comparison Kriteria Sektor Basis.....80	80
Gambar 15.	Pairwise Comparison Sektor Basis .....	80
Gambar 16.	Penentuan Sub Sektor Perekonomian Unggulan Berbasis Sumber Daya Alam.....	81
Gambar 17.	Hasil dan Kriteria .....	82
Gambar 18.	Skor Aspek Potensi Pengembangan Sub Sektor Tanaman Pangan di Kabupaten Tanah Datar .....	89
Gambar 19.	Skor Aspek Potensi Pengembangan Sub Sektor Tanaman Hortikultura di Kabupaten Tanah Datar .....	94
Gambar 20.	Arahan Pengembangan secara Spasial Tanaman Pangan .98	98
Gambar 21.	Arahan Pengembangan secara Spasial Tanaman Hortikultura .....	99

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Eksistensi dari pembangunan nasional tidak bisa dipisahkan dari pembangunan daerah (regional) karena kedua hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah agar terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata, menghindari disparitas pendapatan serta pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan ekonomi akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat di suatu daerah serta reformasi sistem kelembagaan.

Pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah sebaiknya benar-benar memperhatikan aspek lokalitas wilayah sehingga dalam pemanfaatannya mampu mendorong daerah tersebut untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini senada dengan Nindyantoro (2004) yang menyatakan bahwa keberagaman karakteristik daerah berdampak pada perbedaan potensi yang dimiliki sehingga memicu adanya disparitas antar wilayah. Untuk itu pembangunan wilayah sangat bergantung pada kondisi geografis dan sosial budaya.

Pembangunan berimbang dan merata merupakan kondisi yang diharapkan dengan ditunjukkan terpenuhinya potensi-potensi

pembangunan daerah sesuai dengan karakteristiknya yang beragam (Rustiadi et al: 2011). Tercapainya pembangunan berimbang (balanced development) adalah bagian dari konsekuensi penting pembangunan wilayah. Konsep pembangunan merata di setiap daerah bukan berarti harus dilakukan pembangunan yang sama (equally developed), juga bukan mengharuskan terlaksananya industrialisasi yang sama di tiap daerah, melainkan pembangunan dilakukan berpedoman pada apa yang menjadi kebutuhan daerah.

Menurut Arsyad (1999) pembangunan ekonomi daerah merupakan upaya pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat serta menjalin kerjasama dengan sektor swasta semata-mata untuk mewujudkan lapangan kerja baru sehingga memacu pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan. Dalam upaya tersebut masyarakat dan pemerintah daerah harus berinisiatif satu sama lain dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Inisiatif yang dilakukan dengan melihat potensi sumberdaya yang akan dimanfaatkan dalam mendukung serta mengakselerasi pembangunan daerah.

Menurut Miraza (2005), keterkaitan pembangunan antar daerah menciptakan haluan pembangunan yang saling mendukung antara satu daerah dengan daerah yang lain sehingga terwujudnya pembangunan dengan pendekatan wilayah. Situasi tersebut sebagai upaya mencegah ketidakjelasan dalam pemanfaatan potensi ekonomi sebagai dampak dari gejolak dalam struktur kelembagaan di pemerintahan. Tujuannya adalah

agar diperoleh output yang maksimal akibat pemanfaatan sumberdaya masing-masing daerah.

Sektor unggulan daerah adalah sektor yang berpotensi untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah karena memiliki beberapa kriteria dan keunggulan dari sektor lain (Hajeri et al: 2015). Untuk itu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka kebijakan pembangunan yang dilakukan harus didasarkan pada sektor apa yang menjadi unggulan pada suatu wilayah. Sebagai sektor yang sangat penting dalam pembangunan, sektor unggulan tidak hanya bergantung pada letak secara geografis akan tetapi letaknya menyebar pada sektor-sektor yang ada yang berhubungan dengan perekonomian hingga mampu mendorong perekonomian secara menyeluruh.

Berdasarkan pendapat Rustiadi dkk (2011) menyatakan bahwa wilayah merupakan komponen geografis yang mempunyai batasan tertentu dimana pada setiap bagian memiliki makna didalam elaborasi sebuah pengelolaan sumber daya dan perencanaan. Sedangkan Adisasmita (2010) menjelaskan bahwa wilayah didefinisikan berupa keutuhan geografis dari sebuah ruang yang memiliki Batasan dan sistem dengan berpedoman pada aspek administrasi. Dari pengertian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa wilayah tidak memiliki batasan yang khusus dan istilah wilayah merupakan tempat yang didalamnya ada interaksi antara manusia dengan sumber daya yang ada pada batasan geografis yang sudah diatur.

Pengembangan wilayah menurut Rustiadi dkk (2011) yaitu ditandai dengan adanya pengembangan kegunaan tertentu dari suatu elemen wilayah, meliputi kegunaan sosial, politik, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan yang memiliki kaitan antar Kawasan. Kesejahteraan suatu wilayah dapat dilihat dari indikator laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Tarigan (2005) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan adanya peningkatan pemasukan bagi masyarakat di suatu wilayah secara menyeluruh, yaitu peningkatan nilai tambah. Kapabilitas dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh daya saing atau keunggulan dari sektor-sektor perekonomian di wilayah tersebut.

Daerah yang maju maupun tertinggal sangat membutuhkan arah pengembangan wilayah yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi disparitas. Menurut secara mutlak bentuk kebijakan pengembangan wilayah pada suatu daerah mungkin bisa saja berhasil namun untuk daerah yang lain belum tentu sama (Arsyad: 1999). Salah satu langkah yang ditempuh untuk menaikkan perekonomian masyarakat disuatu daerah yaitu dengan menerapkan strategi berupa pengembangan wilayah berdasarkan sektor unggulan. Oleh karena itu, penerapan strategi pengembangan wilayah yang benar dengan mendeteksi dan menelusuri kemampuan ekonomi suatu wilayah agar terwujud kegiatan ekonomi yang berdaya saing dan bernilai tinggi akan memberi manfaat meningkatnya pendapatan daerah (Satria;2017)

Pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh kondisi kontribusi dari sektor-sektor pendapatan domestik regional bruto (PDRB) dimana peningkatan PDRB yang terjadi setiap tahun adalah refleksi terhadap pembangunan perekonomian pada suatu wilayah. PDRB menggambarkan kondisi jumlah produksi neto barang/jasa dimana selain digunakan untuk mengetahui gambaran perekonomian suatu daerah dan alat evaluasi pembangunan, PDRB juga digunakan sebagai titik tolak dalam melakukan perencanaan, melakukan proyeksi perekonomian di masa akan datang, serta selaku agenda investasi dimasa depan.

Provinsi Sumatera Barat mempunyai kekhasan berupa daerah yang perekonomiannya dibangun dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi andalan. Hal ini dapat dilihat dari nilai distribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat merupakan yang paling besar dari sektor lain.

Tabel 1. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Lapangan Usaha seri 2010 (rincian)	Distribusi PDRB Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha (Persen)			
	Harga Berlaku		Harga Konstan 2010	
	2018	2019	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,18	22,17	22,33	22,17
B. Pertambangan dan Penggalian	4,26	4,29	4,09	4,29
C. Industri Pengolahan	9,09	8,37	10,03	8,37
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,10	0,09
F. Konstruksi	9,64	10,09	9,19	10,09
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,31	15,80	15,85	15,80

Lapangan Usaha seri 2010 (rincian)	Distribusi PDRB Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha (Persen)			
	Harga Berlaku		Harga Konstan 2010	
	2018	2019	2018	2019
H. Transportasi dan Pergudangan	12,66	12,60	12,18	12,60
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,36	1,42	1,12	1,42
J. Informasi dan Komunikasi	5,47	5,82	7,15	5,82
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,01	2,90	2,84	2,90
L. Real Estate	1,96	2,01	1,93	2,01
M,N Jasa Perusahaan	0,43	0,44	0,44	0,44
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,92	6,13	5,60	6,13
P. Jasa Pendidikan	4,20	4,34	3,89	4,34
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,39	1,42	1,41	1,42
R,S,T,U Jasa Lainnya	1,93	2,00	1,76	2,00
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan distribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2019, sehingga kondisi ini mengakibatkan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

Sama halnya dengan Provinsi Sumatera Barat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar disokong oleh 17 (tujuh belas) sektor yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa

kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya. (Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2020). Dari 17 sektor peneliti akan berfokus pada sektor berbasis sumber daya alam berupa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; dan pertambangan dan penggalian. Selain itu juga sektor pariwisata juga diperhitungkan karena pariwisata banyak bersumber dari sumber daya alam, untuk sektor pariwisata peneliti menggunakan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum atas dasar penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2019) yang berjudul " Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Nusa Tenggara Timur" dimana hasilnya menunjukkan bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sangat berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Berikut kontribusi sektor ekonomi dalam perekonomian Kabupaten Tanah Datar selama 2013-2019.

Tabel 2. PDRB Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2015-2019

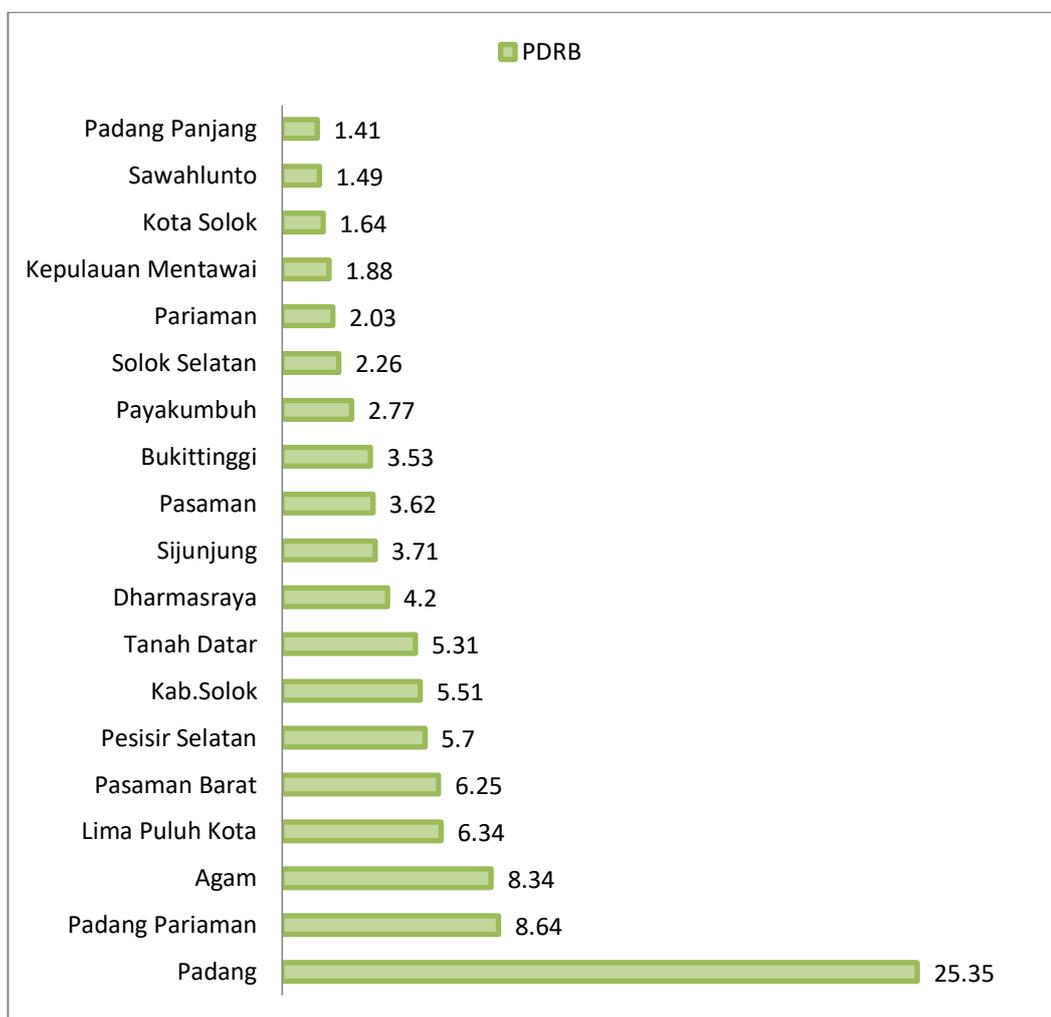
Sektor PDRB seri 2010	PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)						
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,830,425.00	2,767,703.00	2,688,955.00	2,603,988.00	2,575,518.00	2,465,574.60	2,353,788.60
Pertambangan dan Penggalian	282,536.00	266,507.00	251,837.00	243,890.00	228,662.00	213,648.90	199,732.40
Industri Pengolahan	1,105,782.00	1,091,366.00	1,077,249.00	1,051,128.00	1,000,338.00	979,383.30	936,043.90
Pengadaan Listrik dan Gas	2,077.00	2,034.00	1,959.00	1,888.00	1,715.00	1,644.90	1,421.50
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	11,146.00	10,621.00	10,362.00	10,003.00	9,454.00	8,967.90	8,469.20
Konstruksi	965,677.00	900,114.00	835,974.00	772,651.00	717,818.00	677,388.10	640,491.80

Sektor PDRB seri 2010	PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)						
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,326,232.00	1,245,546.00	1,162,700.00	1,084,685.00	1,014,518.00	956,029.20	887,412.40
Transportasi dan Pergudangan	919,195.00	848,757.00	791,816.00	736,316.00	678,918.00	622,862.70	575,387.70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	66,058.00	60,444.00	55,617.00	50,871.00	47,413.00	44,292.80	41,796.40
Informasi dan Komunikasi	574,552.00	528,454.00	486,040.00	451,979.00	412,635.00	378,386.00	350,949.00
Jasa Keuangan dan Asuransi	237,862.00	230,739.00	227,500.00	223,925.00	208,961.00	199,183.00	186,962.30
Real Estate	149,943.00	142,237.00	136,123.00	130,989.00	125,131.00	118,299.60	111,018.50
Jasa Perusahaan	3,630.00	3,428.00	3,259.00	3,072.00	2,903.00	2,741.80	2,592.40
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	609,034.00	567,800.00	535,085.00	512,931.00	489,575.00	475,811.20	459,543.40
Jasa Pendidikan	293,603.00	271,267.00	250,059.00	229,433.00	211,479.00	195,351.00	183,739.10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	133,053.00	124,283.00	115,288.00	107,466.00	101,571.00	93,563.40	86,833.10
Jasa lainnya	178,903.00	165,758.00	152,276.00	139,857.00	128,460.00	119,621.50	113,267.60
<b>PDRB</b>	<b>9,689,707.00</b>	<b>9,227,057.00</b>	<b>8,782,098.00</b>	<b>8,355,072.00</b>	<b>7,955,070.00</b>	<b>7,552,749.70</b>	<b>7,139,449.20</b>

Sumber: Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2020

Angka distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan peranan sektor dalam perekonomian. Dapat dilihat dari tabel 2 sektor yang mempunyai peranan paling besar pada tahun 2019 adalah pertanian, kehutanan dan perikanan dengan persentase 29,21 persen namun pertumbuhannya dibandingkan sektor lain sangat kecil yaitu 2,27 persen. Sementara itu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu 9,29 persen. Penurunan laju

pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga menyebabkan terjadinya perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.



Gambar 1. Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2019 (miliar rupiah)

Gambar 1 menunjukkan apabila dilihat dari segi nilai PDRB dan andil terhadap pembentukan PDRB Sumatera Barat, dapat digambarkan perbandingan besaran PDRB Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dimulai dari kontribusi yang terbesar yaitu Kota Padang sebesar 25,35 persen

sampai dengan yang terendah yaitu Kota Padang Panjang sebesar 1,41 persen. Kabupaten Tanah Datar termasuk dalam 10 besar penyumbang PDRB terbesar untuk Provinsi Sumatera Barat dengan nilai distribusi sebesar 5,31 persen ditambah lagi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang sama-sama menjadi sektor penyumbang PDRB terbesar.

Selanjutnya, alokasi belanja langsung perurusan selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana berikut:

Tabel 3. Alokasi Belanja Langsung Per Urusan di Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2015-2019

No	Alokasi Anggaran Perurusan di Kabupaten Tanah Datar						Jumlah	
	Nama Urusan		Tahun					
			2015	2016	2017	2018		2019
1	Pendidikan		44,860,030,071.00	26,328,619,000.00	84,703,896,360.00	74,621,980,595.00	90,777,341,425.00	321,291,867,451.00
2	Kesehatan		97,325,822,754.00	130,204,862,600.00	176,376,652,334.00	150,687,007,105.50	195,626,323,602.63	750,220,668,396.13
3	Pekerjaan Umum		103,142,933,110.00	147,891,526,100.00				251,034,459,210.00
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			110,212,884,998.00	146,802,048,381.00	143912608856,74	257,014,933,379.00
4	Perumahan		971,960,000.00	1,411,090,000.00				2,383,050,000.00
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			3,140,937,875.00	6,105,782,200.00	3,596,950,246.00	12,843,670,321.00
		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			20,125,210,447.00	29,176,360,083.00	16,516,830,744.00	65,818,401,274.00
5	Penataan Ruang		1,522,294,500.00	1,657,275,000.00				3,179,569,500.00
6	Perencanaan Pembangunan		5,642,104,000.00	5,670,549,880.00				11,312,653,880.00
7	Perhubungan		2,860,542,000.00	2,238,561,000.00	4,679,732,685.00	3,056,938,319.00	3,378,212,000.00	16,213,986,004.00
8	Lingkungan Hidup		5,447,639,700.00	5,927,403,000.00	6,399,007,237.00	5,308,816,440.00	6,186,062,420.00	29,268,928,797.00
9	Pertanahan		2,716,972,500.00	1,397,668,200.00	671,633,500.00	3,551,407,500.00	7,560,919,162.40	15,898,600,862.40
10	Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1,720,974,800.00	2,788,482,000.00				4,509,456,800.00
		Administrasi Kependudukan dan Capil			3,365,341,004.00	4,065,606,200.00	2,851,371,400.00	10,282,318,604.00
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		852,944,500.00	1,039,936,550.00	1,130,047,967.00	1,214,537,400.00	1,242,690,070.00	5,480,156,487.00

No	Alokasi Anggaran Perurusan di Kabupaten Tanah Datar						Jumlah	
	Nama Urusan	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019		
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		1,351,194,500.00	1,857,247,200.00				3,208,441,700.00
		Pengendalian Penduduk dan KB			5,165,631,900.00	2,576,996,035.00	7,380,385,498.00	15,123,013,433.00
13	Sosial		1,538,193,400.00	1,795,646,750.00	2,093,827,190.00	2,256,503,703.00	1,628,993,182.00	9,313,164,225.00
14	Tenaga Kerja		397,125,000.00	447,512,100.00	556,547,300.00	908,620,200.00	394,220,075.00	2,704,024,675.00
		Pangan			2,675,448,850.00	2,797,061,400.00	2,852,508,026.00	8,325,018,276.00
15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		2,012,729,400.00	1,823,210,700.00	1,314,857,723.00	1,195,243,999.00	1,424,934,650.00	7,770,976,472.00
16	Penanaman Modal		121,106,000.00	312,771,500.00	1,365,782,687.00	694,680,000.00	1,023,277,825.00	3,517,618,012.00
17	Kebudayaan		3,191,106,000.00	3,220,526,750.00	2,096,346,047.00	1,008,674,900.00	2,969,968,600.00	12,486,622,297.00
18	Pemuda dan Olah Raga		3,308,804,250.00	6,805,355,050.00				10,114,159,300.00
		Kepemudaan dan Olah Raga			8,562,309,684.00	6,011,736,600.00	4,452,883,500.00	19,026,929,784.00
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		14,020,017,800.00	15,017,031,400.00				29,037,049,200.00
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian		65,351,166,275.00	70,064,192,150.00				135,415,358,425.00
		Administrasi Pemerintahan			55,766,672,858.00	55,145,311,466.00	50,495,667,276.00	161,407,651,600.00
		Pengawasan			2,777,107,133.00	2,781,931,400.00	2,418,724,050.00	7,977,762,583.00
		Perencanaan			5,525,826,202.00	6,462,935,152.00	3,901,641,335.00	15,890,402,689.00
		Keuangan			6,443,160,298.00	11,083,096,250.00	4,698,277,150.00	22,224,533,698.00
		Kepegawaian			5,003,873,860.00	4,539,106,397.00	6,482,743,500.00	16,025,723,757.00
21	Ketahanan Pangan		2,885,484,060.00	3,595,588,500.00				6,481,072,560.00

No	Alokasi Anggaran Perurusan di Kabupaten Tanah Datar						Jumlah	
	Nama Urusan		Tahun					
			2015	2016	2017	2018		2019
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		10,055,977,700.00	8,475,302,150.00	6,323,649,531.00	7,997,537,550.00	6,351,588,440.00	39,204,055,371.00
23	Statistik		399,490,000.00	451,412,000.00	1,027,323,946.00	829,365,000.00	1,024,014,400.00	3,731,605,346.00
		Persandian			53,396,000.00		40,000,000.00	93,396,000.00
24	Kearsipan		1,529,517,400.00	2,898,993,000.00	316,720,600.00	364,690,991.00	125,085,900.00	5,235,007,891.00
25	Komunikasi dan Informatika		2,779,139,000.00	3,436,806,000.00	5,862,230,855.00	6,062,082,290.00	5,940,610,672.00	24,080,868,817.00
26	Perpustakaan		287,717,000.00	175,775,000.00	3,684,064,200.00	3,615,703,518.00	4,925,097,200.00	12,688,356,918.00
27	Petanian		30,616,699,376.00	12,038,897,420.00	12,310,132,391.00	11,422,124,461.00	8,388,490,212.00	74,776,343,860.00
28	Kehutanan		2,023,904,911.00	1,325,460,000.00				3,349,364,911.00
29	Energi dan Sumber Daya Mineral		694,066,500.00	425,156,000.00	104,028,000.00	257,384,300.00	81,360,000.00	1,561,994,800.00
30	Pariwisata		2,893,215,650.00	3,272,851,000.00	18,031,701,500.00	10,005,589,000.00	17,869,022,607.00	52,072,379,757.00
31	Kelautan dan Perikanan		5,962,568,200.00	4,161,275,000.00	2,812,504,250.00	3,289,290,437.00	2,388,584,721.00	18,614,222,608.00
32	Perdagangan		1,027,467,000.00	965,510,500.00	1,862,873,137.00	2,579,584,800.00	6,185,250,721.00	12,620,686,158.00
33	Perindustrian		385,084,000.00	940,064,500.00	16,101,555,787.00	3,313,808,600.00	9,597,890,900.00	30,338,403,787.00

Sumber: Perda APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2019 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat selama tahun 2015-2019 untuk alokasi belanja langsung urusan pertanian sebanyak Rp.74,776,343,860.00 berada di urutan kelima dibawah urusan Kesehatan (Rp.750,220,668,396.13) dan Pendidikan (Rp.321,291,867,451.00) yang bersifat mandatory serta urusan pekerjaan umum (Rp.508,049,392,589.00) dan fungsi penunjang (Rp.296,823,010,025.00) sehingga tampak bahwa alokasi belanja langsung untuk urusan pertanian sebagai kontributor terbesar terhadap PDRB di Kabupaten Tanah Datar masih belum menjadi prioritas.

Penelitian akan berfokus pada sektor perekonomian yang berbasis sumber daya alam, karena dari data PDRB Kabupaten Tanah Datar sektor yang berbasis sumber daya alam menjadi penyumbang terbesar dan andalan di Kabupaten Tanah Datar. Masalah lain yaitu di Kabupaten Tanah Datar yaitu pada tahun 2019 data dari Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar masih terdapat 942 Ha lahan pertanian yang belum dimanfaatkan dari total 106.543 Ha lahan pertanian di Kabupaten Tanah Datar.

Dari keadaan di atas, muncul pertanyaan apakah rencana pembangunan yang telah ditetapkan selama ini sudah sesuai dengan sektor unggulan daerah dan memberikan pengaruh yang baik kepada penambahan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Konsekuensi dari keterbatasan sumber daya menuntut

pelaksanaan pembangunan harus berpusat kepada sektor yang memiliki multiplier effect terhadap kondisi perekonomian dan sektor-sektor lain.

Penelitian ini dilakukan untuk menentukan sub sektor unggulan berbasis sumber daya alam di Kabupaten Tanah Datar dan menganalisis arahan pengembangan sub sektor sektor unggulan berbasis sumber daya alam tersebut sehingga nantinya dijadikan pedoman perumusan kebijakan dan perencanaan pengembangan wilayah yang berdampak pada perekonomian di Kabupaten Tanah Datar dapat tumbuh dengan cepat.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari deskripsi di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

1. Sub sektor berbasis sumber daya alam mana yang menjadi unggulan di Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana arah pengembangan sub sektor berbasis sumber daya alam unggulan di Kabupaten Tanah Datar baik secara substansial maupun spasial?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis sub sektor berbasis sumber daya alam unggulan dalam perekonomian di Kabupaten Tanah Datar.
2. Menganalisis arah pengembangan sub sektor berbasis sumber daya alam unggulan di Kabupaten Tanah Datar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan informasi baik bagi masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya mengenai sub sektor berbasis sumber daya alam mana yang menjadi keunggulan di Kabupaten Tanah Datar.
2. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam merumuskan kebijakan pengembangan wilayah di Kabupaten Tanah Datar.
3. Sebagai acuan bagi peneliti lain yang berhubungan dengan pengembangan wilayah dan perencanaan ekonomi daerah.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pembahasan penelitian ini adalah menganalisis apa yang menjadi sub sektor unggulan berbasis sumber daya alam di Kabupaten Tanah Datar untuk selanjutnya ditentukan arahan pengembangannya berdasarkan aspek spasial dan substansi. Periode penelitian pada satu titik waktu yaitu kondisi Kabupaten Tanah Datar

tahun 2015-2019. Sementara itu untuk ruang lingkup wilayah yaitu Kabupaten Tanah Datar yang memiliki 14 Kecamatan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pembangunan Ekonomi Daerah**

Berbicara mengenai pembangunan ekonomi tentu sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi sangat berperan dalam mempercepat pembangunan ekonomi. Menurut Jinghan M.L. (2004) menyatakan apabila berbicara mengenai kiat dalam pembangunan perekonomian, modal yang harus dimiliki yaitu ada 4 (empat) aspek, yaitu: 1) Sumber daya manusia (pendidikan, kesiapan tenaga kerja, dan tekad atau motivasi), 2) Sumber daya alam (mineral, bahan bakar, iklim dan tanah), 3) Pembentukan modal (jalan raya, dan mesin), 4) teknologi (rekayasa, pengetahuan, dan manajemen). Pertumbuhan ekonomi dan arah pengembangan daerah menuju pertumbuhan dapat dikontribusi oleh keempat aspek tersebut.

Menurut Aris (2010) yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi daerah yaitu upaya untuk membangun lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan proses berupa pembangunan industri alternatif, pembangunan institusi baru, pengembangan kapasitas tenaga kerja, alih teknologi dan mendirikan perusahaan.

## **B. Pengertian Sektor Unggulan**

Sektor unggulan merupakan sektor yang paling penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi karena memiliki kekuatan dan kapasitas yang tinggi didalam perekonomian. Sektor unggulan merupakan tumpuan dan pendorong dalam meningkatkan perekonomian sehingga dapat disebut juga dengan sektor utama dalam perekonomian suatu wilayah. Oleh karena itu, sektor unggulan merupakan gambaran atau refleksi dari sistem perekonomian suatu wilayah sehingga dapat juga dipandang sebagai sebuah spesialisasi atau entitas perekonomian (Deptan, 2005).

Keberadaan sektor unggulan ekonomi saat ini menjadi sangat vital, hal ini disebabkan karena peranannya sangat signifikan terhadap perekonomian. Sebagai sektor yang sangat kuat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan aspek sumberdaya ekonomi lokal maka sektor unggulan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengembangan kebijakan ekonomi.

Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk mengetahui apakah sektor tersebut unggulan atau tidak. Sektor unggulan dapat ditentukan dengan melakukan penghitungan LQ (Location Quotient) dan Shift Share dengan menggunakan 4 (empat) penghitungan utama yaitu mengetahui tingkat daya saing, mengetahui sektor basis, mengetahui tingkat pertumbuhan dan mengetahui tingkat progresifitas seluruh sektor ekonomi. (Hood: 1998, dalam Hendrayana (2003). Sedangkan menurut

Sambodo (2002) menyatakan bahwa dalam menentukan sektor unggulan dapat dilihat berdasarkan kontribusi sektor terhadap perekonomian daerah, antara lain: sektor yang mempunyai laju pertumbuhan yang tinggi, penyerapan tenaga kerja yang besar, memiliki keterkaitan antar sektor dan mampu menciptakan nilai tambah.

Pada era Otonomi saat ini, penentuan sektor unggulan menjadi urusan yang sangat vital sebagai dasar perumusan perencanaan pembangunan wilayah. Dengan dasar tersebut daerah memiliki hak untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dan selaras dengan aspek lokalitas daerahnya sehingga diharapkan terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

### **C. Sumber Daya Alam**

Sumber daya alam adalah entitas yang terdapat di alam yang bermanfaat dan memiliki nilai. Apabila entitas tersebut tidak diketahui manfaatnya maka belum bisa disebut sumber daya alam karena tidak memiliki nilai. Menurut Solihin dkk (2007), sebuah entitas dapat dikatakan sumber daya alam apabila mengantongi 3 (tiga) syarat, yaitu: 1) sesuatu itu ada, 2) dapat diambil, dan 3) bermanfaat. Dengan demikian, pengertian SDA mempunyai sifat dinamis, dalam arti peluang sesuatu benda menjadi sumberdaya selalu terbuka.

Ruang lingkup dari SDA termasuk semua yang diberikan dan disediakan oleh alam baik di atas maupun di bawah bumi, baik yang hidup

ataupun tidak hidup. Potensi sumber daya alam di suatu wilayah yang dimanfaatkan melalui berbagai macam kegiatan sektoral dapat memberikan kontribusi yang nyata pada perekonomian di suatu wilayah. Sumbangan pendapatan sektor kegiatan yang berbasis pada sumber daya alam di berbagai daerah berpotensi meningkatkan pendapatan daerah dan sekaligus mampu memicu perkembangan ekonomi wilayah. Dari 17 sektor PDRB di Kabupaten Tanah Datar diperoleh sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan serta sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan sektor berbasis sumber daya alam. Selain itu juga sektor pariwisata yang dilihat dari penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi pertimbangan karena pariwisata juga bersumber dari sumber daya alam.

#### **D. Teori Pengembangan Wilayah**

Menurut Adisasmita (2010), wilayah memiliki makna sebuah lokasi suatu aktivitas perekonomian seperti perusahaan, fasilitas Kesehatan, pabrik atau industri, untuk itu dalam penentuan lokasinya sangat bergantung pada kelangsungan aktivitas ekonomi tersebut. Pada tahun 1965, terdapat laporan PBB dengan judul "Toward Accelerated Development: Proposals for the second decade" yang dibuat oleh UN-Committee for development dalam Umami et al (2014), terdapat 3 (tiga) syarat yang ditegaskan dalam rangka melakukan percepatan pengembangan wilayah : 1) pergerakan potensi dan sumber daya

lokalitas; 2) peranan seluruh masyarakat dalam melakukan pembangunan dan upaya memenuhi standar kebutuhan minimum; 3) dalam rangka pembangunan berkelanjutan untuk perlu diterapkan perencanaan partisipatif.

Menurut Arsyad (1999) beberapa fungsi perencanaan pembangunan yaitu: 1) dengan perencanaan diperoleh pedoman dan pengarah dalam melakukan kegiatan, 2) dengan perencanaan dapat diprediksi potensi dan resiko yang akan dihadapi, 3) dengan perencanaan dapat diketahui pilihan alternatif dari sekian banyak pilihan yang ada, 4) untuk alat kontrol dan evaluasi. Menurut Nurzaman (2012) dalam melakukan perencanaan wilayah harus didasarkan pada perencanaan sehingga tidak boleh asal-asalan sehingga harus benar-benar memperhatikan potensi dan keistimewaan dari sebuah daerah. Perencanaan wilayah dapat diartikan sebagai sebuah upaya perencanaan pembangunan ekonomi dengan memperhitungkan aspek spasial dari tempat yang akan dilaksanakan kegiatan ekonomi. Untuk itu dalam pengembangan wilayah diperlukan perencanaan yang matang agar esensinya berupa perkembangan pembangunan dapat terlaksana secara berkelanjutan.

Selanjutnya, menurut Norton yang dikutip Edo et al (2018) dalam pelaksanaan pengembangan berkelanjutan tingkat lokal terdapat 6 aspek paling penting yaitu : 1) melakukan promosi pemanfaatan lahan yang sesuai dengan alam, 2) melakukan promosi dalam rangka penggunaan

lahan sebagai tempat yang layak untuk hidup, 3) melakukan promosi mengenai pembangunan perekonomian berdasarkan karakteristik lokal, 4) mengutamakan prinsip adil dan proporsional dalam memanfaatkan sumber daya sosial dan ekonomi, 5) berprinsip tentang tanggung jawab kepada pencemar dengan membayar denda atas kerusakan yang ditimbulkan, 6) melakukan promosi tentang pertanggungjawaban regionalise. Untuk langkah yang tepat dalam rangka melaksanakan aspek tersebut adalah dengan mengembangkan sektor unggulan.

Sumber daya yang ada di suatu wilayah dapat dilihat dalam komponen sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dalam suatu upaya pengembangan wilayah M.T. Zen dalam alkadri dkk (1999) menyebutkan bahwa perkembangan wilayah dalam 2 atau 3 dasawarsa mendatang akan sangat tergantung pada kemampuannya untuk mengarahkan tiga unsur pokok yaitu 1) ketersediaan SDA, 2) ketersediaan SDM, 3) pemanfaatan teknologi yang yang kesemuanya tersebut dimanfaatkan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam membuat arahan pengembangan wilayah sangat ditentukan dari ketiga aspek sumber daya tersebut, sehingga arahan apa yang dilakukan di tiap wilayah akan berbeda satu sama lainnya.

### **E. Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Boediono (1999) menyatakan bahwa aspek yang mempengaruhi peningkatan hasil perkapita dan adanya penjelasan bagi

aspek tersebut berproses sehingga mencapai pertumbuhan merupakan pengertian dari teori pertumbuhan ekonomi. Persentase peningkatan jumlah penduduk harus lebih sedikit atau tidak boleh melewati persentase peningkatan hasil sehingga dalam jangka waktu tertentu pertumbuhan akan terus dicapai.

Menurut Sirojuzilam dan Kasyful (2010) pandangannya tentang pertumbuhan ekonomi yaitu sebuah refleksi dari akibat kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah pada aspek ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan aspek penting bagi sebuah daerah untuk melihat hasil capaian pembangunan yang sudah dilaksanakan dimana proses yang terjadi yaitu adanya penambahan produksi dan jasa di sektor ekonomi.

Ulasan mengenai indikator penyebab terwujudnya pembangunan perekonomian yang baik dan struktur penggerak perekonomian daerah amat penting karena dengan hal ini pemerintah daerah mampu menganalisis apa saja yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini merupakan esensi dari adanya otonomi daerah sehingga banyak daerah berpacu untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera (Sjafrizal: 2008).

Menurut Tarigan (2012) pertumbuhan ekonomi wilayah ditandai dengan adanya peningkatan (value added) pendapatan masyarakat di wilayah tersebut secara menyeluruh dan juga ukuran besarnya value added menandakan kemakmuran suatu wilayah. Untuk adanya nilai tambah (value added) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

## **F. Produk Domestik Regional Bruto**

Salah satu aspek yang dilihat sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu wilayah yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Hadi Sasana, 2006). Nilai tambah bruto yang didapat pada suatu wilayah dengan mengabaikan faktor produksi apakah residen atau tidak dimana nilai tersebut diperoleh dari kegiatan ekonomi dalam periode tertentu disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (BPS Kabupaten Tanah Datar, 2020). Dalam menyusun PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendapatan, pengeluaran dan produksi yang dijelaskan baik dalam bentuk atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku (BPS Kabupaten Tanah Datar, 2020). Menurut BPS (2020), PDRB nominal (atas dasar harga berlaku) penghitungannya berpedoman pada waktu penghitungan dengan tujuan memperoleh informasi terkait struktur perekonomian, sedangkan atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat nilai pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dengan berpedoman pada harga tahun dasar.

## **G. Teori Basis Ekonomi**

Menurut Tarigan (2012) dasar pandangan teori ini yaitu pada besarnya ekspor dari suatu wilayah menandakan laju pertumbuhan ekonomi wilayah bersangkutan. Semua kegiatan yang mendatangkan uang dari luar daerah akibat dari kegiatan menghasilkan produk dan jasa disebut kegiatan basis. Kegiatan non basis merupakan berkaitan dengan

kebutuhan masyarakat lokal sehingga naiknya pendapatan masyarakat sangat mempengaruhi, sehingga posisinya tidak bisa lebih banyak dari pertumbuhan ekonomi wilayah dan kondisi perekonomian setempat. Untuk itu sektor yang mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi adalah sektor basis.

Tiebout adalah orang yang mengemukakan teori basis ekonomi ekspor untuk pertama kali, menurut Tiebout dalam Kharisma (2019) menjelaskan bahwa teori ini melakukan analisa terhadap sektor basis dan non basis yang memisahkan setiap kegiatan produksi yang menghasilkan output dari sebuah wilayah. Kegiatan basis ekonomi mampu mendorong kegiatan lain untuk tumbuh tanpa terikat pada kondisi internal wilayah (bebas tumbuh) sedangkan kegiatan non basis hanya mampu memenuhi kebutuhan penduduk setempat (tidak bebas tumbuh).

Menurut Sjafrizal (2008) menyatakan bahwa dikarenakan memiliki daya saing yang tinggi sehingga sektor basis menjadi tumpuan dalam perekonomian suatu daerah. Sedangkan sektor non basis dikatakan sebagai service industries, meskipun kurang memiliki daya kompetitif sektor non basis diperlukan sebagai penunjang sektor basis. Selanjutnya, dinyatakan bahwa teknik Location Quotient dapat digunakan untuk menganalisis sektor basis di suatu daerah (Tarigan: 2012). LQ merupakan suatu perbandingan yang dilakukan dengan melihat kemampuan suatu sektor di suatu daerah terhadap kemampuan sektor tersebut secara nasional. Kuosien lokasi (LQ) merupakan teknik analisis yang biasa

dipakai untuk melihat sektor basis, dengan mengamati sejauh mana pengkhususan/spesialisasi sektor basis sebagai sektor unggulan. Kesempatan kerja, dan PDRB merupakan aspek pertumbuhan daerah yang digunakan dalam LQ.

Terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan mengenai potensi perekonomian suatu daerah, yaitu:

- Analisis Shift Share

Menurut Mulyanto dalam Aris (2010) Analisis Shift Share dipakai untuk menemukan dan melihat kinerja dari masing-masing sektor yang berkembang dan dilakukan perbandingan dengan wilayah di atas. Menurut Tarigan (2012) menjelaskan bahwa teknik Shift Share lebih tajam dari LQ, hal ini dikarenakan teknik LQ tidak menjabarkan indikator penyebab terjadinya perubahan.

- Analisis Location Quotient (LQ)

Teknik LQ seing dipakai untuk membahas situasi ekonomi, mengidentifikasi apa yang menjadi sektor unggulan di daerah (Rachmad Hendrayana, 2003). Hingga saat ini teknik LQ masih eksis digunakan dalam beberapa penelitian seperti Mizuno et, al (2006) LQ digunakan untuk mengidentifikasi masalah pengangguran regional. Lesage (1990) dan Moore et, al, (1994) menggunakan LQ untuk menemukan titik balik perekonomian daerah (Chiang dikutip Saifullah; 2015). Untuk itu dapat dikatakan bahwa dalam model basis ekonomi teknik LQ sangat relevan digunakan sebagai titik awal pertumbuhan ekonomi.

## **H. Pengembangan Sektor Unggulan Sebagai Upaya Pembangunan Perekonomian Daerah**

Pembangunan dengan berpedoman pada potensi dan karakteristik daerah merupakan hal penting dan menjadi perhatian pokok. Berdasarkan hal tersebut, menurut Arsyad (1999) dalam mewujudkan lapangan kerja baru dan mendorong perekonomian daerah dilakukan pendekatan melalui ide dan gagasan spesifik dari daerah. Menurut Ebtian (2011), dalam upaya akselerasi pertumbuhan perekonomian serta perkembangan struktur ekonomi dapat dilakukan dengan melakukan pembangunan dan berfokus pada sektor unggulan.

Salah satu keuntungan mengetahui sektor unggulan yaitu bisa menjadi petunjuk atau arah bagi perekonomian regional dan nasional (Rachbini: 2001). Sektor unggulan merupakan sektor yang memiliki daya saing dan mampu memberi dampak kepada sektor lain. Arah pengembangan sektor unggulan adalah kiat yang digunakan untuk mengembangkan serta meningkatkan kemampuan sektor unggulan di suatu wilayah. Cara tersebut disusun dengan melihat apa yang menjadi permasalahan di suatu wilayah yang berkaitan dengan sektor unggulan untuk kemudian dirumuskan solusinya.

## **I. Pemetaan Sektor Unggulan**

Peta merupakan gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil dengan symbol-simbol dan keterangan lainnya. Menurut Muhi

(2011) peta adalah gambaran permukaan bumi yang dituangkan ke atas kertas atau media lainnya dimana bentuknya mirip dengan kondisi asli dengan menggunakan skala tertentu. Contohnya, skala 1: 100.000 yang artinya 1 cm di peta mewakili 100.000 km untuk ukuran aslinya di permukaan bumi.

Menurut Muhi (2011) pemetaan sektor unggulan suatu wilayah yaitu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dengan menggambarkan letak dan sebaran potensi sektor unggulan suatu wilayah. Selain itu pemetaan juga dilakukan agar dapat memperoleh informasi mengenai apa yang menjadi permasalahan dan dapat disusun cara penanganannya.

#### **J. Sistem Informasi Geografis**

Sistem Komputer yang dipakai untuk memanipulasi data geografi adalah Sistem Informasi Geografis (Bernhardsen dalam Jetri et, al, 2020). Sistem ini didukung oleh perangkat keras dan perangkat lunak dari computer untuk memperoleh dan memverifikasi data, bertukan dan manajemen data, menyimpan, merubah dan memanipulasi data, analisa dan presentasi data.

Selanjutnya dalam melakukan pemetaan menggunakan ArcGIS. Menurut Siregar (2014) menjelaskan ArcGIS adalah produk software dari ESRI (Environment Science dan Research Institute) yang dikeluarkan tahun 2000 yang memiliki fungsi untuk memeragakan dan menganalisis data spasial, serta membuat peta.

## K. Penelitian Terdahulu

Terdapat banyak penelitian mengenai analisis sektor unggulan perekonomian daerah yang sudah dilakukan, penelitian tersebut meninjau indikator dan aspek berlainan. Berikut dijelaskan sebagian penelitian terdahulu:

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Putri Melati Adela (2016)	Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kota Padangsidempuan Tahun 2008-2013	Tipologi Klassen, analisis Shift Share, dan analisis LQ	Berdasarkan gabungan hasil analisis Tipologi Klassen, Location Quotient, dan Shift Share maka yang merupakan sektor ekonomi unggulan Kota Padangsidempuan yang memenuhi kriteria sebagai sektor maju dan tumbuh dengan pesat, sektor basis, dan memiliki daya saing adalah sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
2	Dodik Surya Mukti Jaya (2012)	Analisis penentuan sektor unggulan perekonomian wilayah Kabupaten Ngawi	Tipologi Klassen - Location Quotient - Shift Share	- Hasil analisis LQ yang menjadi sektor basis ialah sektor pertanian, sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. - Hasil analisis Shift Share ialah sektor pertanian. - Hasil analisis Tipologi Klassen ialah sektor yang maju dan tumbuh pesat yaitu sektor pertanian dan sektor komunikasi. Sektor maju tapi tertekan yaitu sektor keuangan, pesewaan, dan jasa perusahaan,

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				serta sektor jasa-jasa. Sektor potensial atau masih dapat berkembang yaitu sektor industri pengolahan. Sektor yang relatif tertinggal, yaitu sektor pertambangan dan penggalan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi.
3	Choirul Dwi Cahyo (2017)	Analisis Struktur Ekonomi Dan Identifikasi Sektor Unggulan Kota Bontang	Analisis LQ, Shift Share, Tipologi Klassen, dan Kontribusi	Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Kota Bontang memiliki sektor basis yaitu sektor industri pengolahan dan jasa perusahaan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta sektor informasi dan komunikasi merupakan sektor yg mampu menghasilkan komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif. Seluruh sektor perekonomian Kota Bontang pun menunjukkan peningkatan kinerja yang baik terhadap PDRB dan kontribusi PDRB paling besar berasal dari sektor industri pengolahan

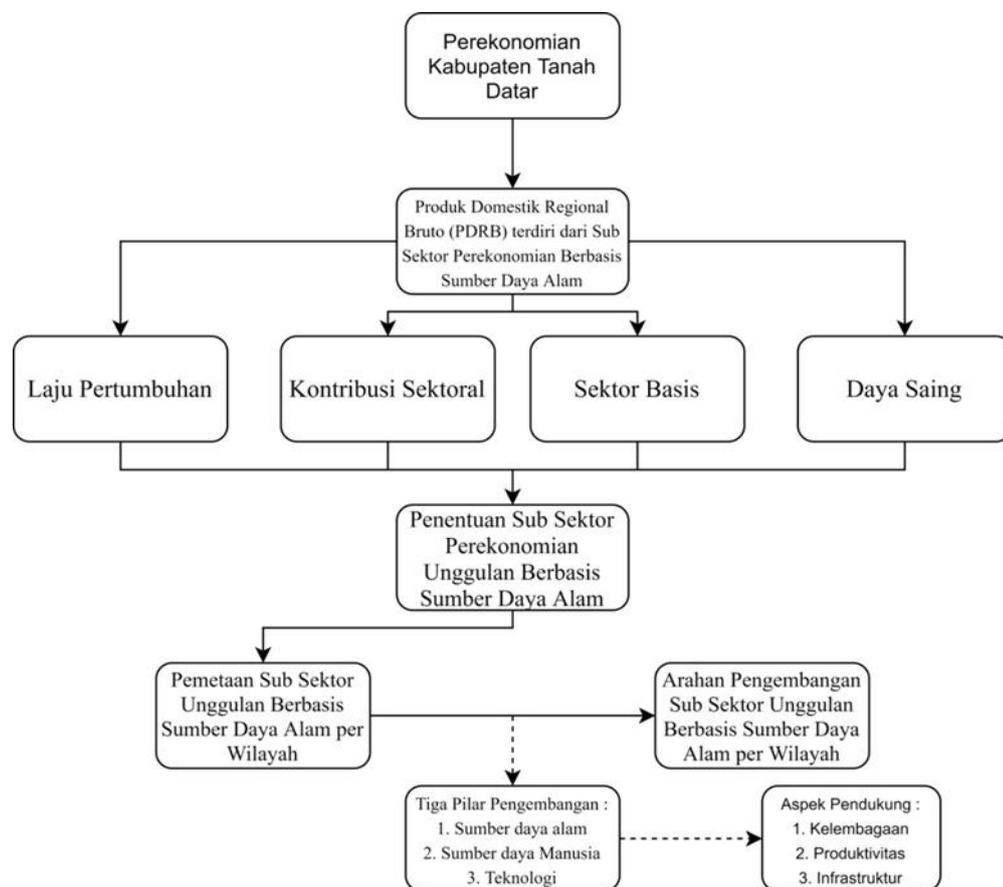
No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Ni Luh Aprilia Kesuma dan I Made Suyana Utama (2015)	Analisis Sektor Unggulan Dan Pergeseran Pangsa Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Klungkung	Analisis Location Quotient (LQ) dan analisis Shift Share	Terdapat empat sektor yang dapat dijadikan sektor unggulan Kabupaten Klungkung diantaranya adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, dan sektor jasa-jasa. Terdapat delapan sektor di Kabupaten Klungkung yang perkembangannya lebih cepat dibandingkan rata-rata perkembangan sektor yang sama di Provinsi Bali, dimana 6 sektor termasuk dalam klasifikasi sektor yang sangat kuat dan 2 sektor termasuk dalam klasifikasi sektor yang kuat. 6 sektor yang termasuk dalam klasifikasi sangat kuat diantaranya adalah sektor listrik, gas, dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa. 2 sektor yang termasuk dalam sektor yang kuat adalah sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan. Kemudian, sektor pertanian termasuk dalam klasifikasi sektor yang sangat lemah bagi perekonomian Kabupaten Klungkung

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5	Bhuiya, Labib dan Rahaman (2013)	Methodological Analysis Of Regional Economy And Employment: Extended Shift-Share For Dhaka District	Analisis Shiftshare	Dhaka merupakan ibukota negara sebagai pusat konsentrasi pembangunan ekonomi bagi Bangladesh untuk perlu mendapat perhatian lebih untuk pengembangannya seperti di bidang manufaktur, bisnis, jasa dan sektor pertanian. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembuat kebijakan dalam melihat wilayah-wilayah yang memiliki potensi ddalam pengembangan ekonomi
6	Rahayu Mustika Wati, Agus Arifin (2019)	Analisis Location Quotient Dan Shift-Share Sub Sektor Pertanian Di Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2017	Analisis LQ, Shift Share	Sub sektor pertanian unggulan di Kabupaten Pekalongan tahun 2013-2017 yaitu tanaman perkebunan
7	Jayanti Mandatari, Abdul Mukti, Eka Nor Taufik	Analisis Potensi dan Kontribusi Subsektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Analisis Kontribusi, Analisis Overlay dari gabungan Location Quotient (LQ), analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) dan analisis Shift-Share	Kontribusi subsektor pertanian penyumbang tertinggi terhadap pendapatan sektor pertanian pada tahun 2017 yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Seruyan yaitu terdapat pada subsektor perkebunan sebesar 57,49% dan 81,62% dan Subsektor perkebunan sebagai subsektor unggul dimasa yang akan datang

## L. Kerangka Konsep Penelitian

Bentuk konseptual mengenai tinjauan pustaka dan keterkaitan dengan berbagai aspek yang telah diidentifikasi merupakan pengertian kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2017). Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian.

Gambar 2 menjelaskan secara umum kerangka konseptual dari penelitian ini.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang di atas maka diharapkan sub sektor berbasis sumber daya alam unggulan di Kabupaten Tanah Datar dapat diketahui dan ditentukan arahan pengembangan baik secara substansial maupun spasial. Pemanfaatan sumber daya alam hendaknya berdampak langsung kepada suatu wilayah sehingga masyarakat juga ikut merasakan peningkatan perekonomian sebagaimana dwifungsi dari sumber daya alam yaitu sebagai modal penggerak ekonomi dan penopang kehidupan. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah yang sebagian besar masyarakatnya masih bergantung kepada sumber daya alam contohnya bermatapencaharian petani. Untuk itu perlu dilakukan analisis untuk memperoleh sub sektor apa yang menjadi keunggulan di Kabupaten Tanah Datar.

Gambaran perekonomian di Kabupaten Datar dapat dilihat dari total PDRB Kabupaten Tanah Datar baik ADHB maupun ADHK. Dalam rangka menentukan sub sektor berbasis sumber daya alam apa yang menjadi keunggulan di Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan kriteria sektor basis, daya saing, laju pertumbuhan, dan kontribusi dari sub sektor tersebut.

Sub sektor unggulan berbasis sumber daya alam dievaluasi di tiap kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan indikator sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur, kelembagaan, dan produktivitas. 1) indikator sumber daya alam dapat dilihat dari potensi eksisting lahan yang ada; 2) indikator sumber daya manusia dapat dilihat dari ketersediaan tenaga kerja; 3) teknologi dapat dilihat dari penerapan atau pemakaian unsur teknologi dalam proses produksi di setiap wilayah di Kabupaten Tanah Datar; 4) Infrastruktur dalam hal ini dapat dilihat dari indikator aksesibilitas atau perhubungan; 5) Produktivitas dalam hal ini dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu, produktivitas lahan dan produktivitas kinerja. Hasil evaluasi tersebut nantinya dijadikan dasar dalam menentukan kecamatan prioritas dan dilakukan pemetaan sesuai dengan spesialisasi komoditi unggulan pada kecamatan tersebut.